

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, di dalam kehidupan ini manusia saling bekerja sama untuk tetap bertahan hidup.

Seperti halnya dalam kegiatan perdagangan, di dalam perdagangan terdapat penjual dan pembeli yang saling membutuhkan untuk berlangsungnya kegiatan tersebut. Di dalam kegiatan perdagangan terdapat penjual yang membutuhkan uang yang didapat dari pembeli dengan cara menjual barang. Begitu halnya dengan pembeli, pembeli memperoleh barang yang mereka butuhkan dari penjual, sehingga terjadi sebuah kegiatan jual beli. Jual beli secara bahasa berarti *Al-Mubadalah* (saling menukar). Dari pengertian tersebut dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat

dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan bermanfaat dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Oleh sebab itu, penjual menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen. Sebaliknya, konsumen pun membutuhkan penjual untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Namun, segala sesuatu tentang jual beli harus sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini bertujuan agar penjual maupun pembeli tidak berperilaku seenaknya sendiri, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pengertian jual beli sendiri adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang

mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.² Sedangkan menurut ulama madzab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³ Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”.⁴

Dalam dunia bisnis harus memperhatikan sebuah etika. Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan standar-standar dalam dunia perbisnisan. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 52

³ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 53

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm 69

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Qur'an adalah *khuluq*. Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, seperti *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).⁵ Konsep ini sangat penting agar kegiatan jual beli tidak menimbulkan kemudharatan, dan transaksi yang dilakukan diberkahi oleh Allah SWT. Hal yang tak kalah penting lainnya yaitu penjual harus memahami kualitas dan kondisi barang yang akan dijual, tidak hanya mencari keuntungan semata, harus mementingkan kebutuhan konsumen juga. Hal ini terkait dengan pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."⁶

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu; Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan *Ijma'* dan *Qiyas* tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses *Ijma'* dan *Qiyas* harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah

⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm 3

⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum, jadi masyarakat harus mematuhi segala sesuatu yang telah diatur. Seperti halnya dalam masalah jual beli harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah banyak hukum yang mengatur mengenai penjual dan pembeli, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur, melindungi konsumen dalam hubungan serta masalah penyediaan dan penggunaan produk dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukuman perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung meningkatkan pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen atau pun pemerintah.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di Kabupaten Tulungagung, banyak toko yang menjual berbagai macam kebutuhan. Mulai dari baju, sepatu, aksesoris dan masih banyak lainnya. Masing-masing toko pasti memiliki cara tersendiri untuk menarik minat pembeli. Apalagi pada zaman sekarang, berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau pengutamaan meraih pangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan pelaku usaha dengan mengupayakan barang dan/atau jasa (produk) yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara penjualan tersebut adalah obral. Barang dijual secara besar-besaran dengan harga yang relatif murah. Mendengar kata obral, pasti konsumen akan tertarik untuk membeli barang tersebut, karena asumsi mereka barang obral adalah barang yang dijual dengan harga yang relatif murah. Padahal yang dimaksud dengan barang obral bukan hanya soal harga melainkan juga ada hal lain yang penjual pertimbangkan untuk menjadikan barang tersebut menjadi barang obral. Hal tersebut mengenai kondisi atau kualitas dari suatu barang, selain itu barang obral dijadikan sebagai strategi untuk persaingan usaha. Karena dalam sebuah usaha diperlukan sebuah strategi untuk menarik minat konsumen.

Terkadang, penjualan sistem obral ini disalahgunakan oleh penjual. Penjualan barang dengan sistem obral dijadikan sebagai cara untuk mengelabui atau menyembunyikan sebuah kekurangan kondisi suatu barang. Biasanya barang yang dijual adalah barang lama yang sudah tidak laku di toko atau barang yang memiliki kecacatan. Maka dari itu, dengan cara obral inilah dilakukan sehingga terjadinya perputaran ekonomi bagi penjual, agar penjual

tidak mengalami kerugian. Namun, hal tersebut juga dapat merugikan konsumen yang hendak membeli barang tersebut. Biasanya konsumen dirugikan dalam hal kualitas dari barang yang dibeli karena pada saat penjualan barang obral tidak dicantumkan tentang spesifikasi barang yang hendak dijual ke umum.

Di Tulungagung terdapat banyak toko yang menjual barang obral. Salah satu tokonya adalah Toko Pretty. Peneliti pun juga tidak asing dengan toko ini, karena toko ini terletak di pusat kota Tulungagung, jadi termasuk di dalam kawasan yang ramai. Peneliti juga cukup sering membeli sepatu di toko ini, secara tidak langsung peneliti mengetahui bagaimana keadaan toko ini. Di toko ini menjual berbagai macam sepatu, sandal, dan tas. Mulai untuk anak sampai orang dewasa. Saat peneliti melakukan observasi lebih tepatnya pada tanggal 5 Desember 2019 peneliti melihat ternyata toko ini menjual berbagai macam merek sepatu dan sandal, seperti merek Ardiles, Calbi, New Era dan masih banyak lagi. Menariknya, ada sebagian sepatu dan sandal yang dijual secara obral. Barang-barang obral ini ditaruh pada sebuah keranjang yang diletakkan di dalam toko, pada atas keranjang diberi tulisan obral beserta harganya agar orang-orang mengetahui bahwa barang tersebut diobralkan dengan harga yang murah.

Namun ternyata, kondisi barang yang diobralkan di sini berbeda dengan barang yang ada di dalam toko. Barang yang diobralkan terlihat tidak terawat, seperti banyak debu sehingga membuat warna sepatu dan sandal berubah dan terlihat sangat kusam. Selain itu ada beberapa jahitan sandal yang sudah lepas

dan bentuk kecacatan lainnya. Penjual tidak menginformasikan bagaimana kondisi barang-barang tersebut, seakan-akan menyembunyikan adanya kekurangan atau cacat tersembunyi dalam sepatu dan sandal tersebut. Penjual pun tidak menginformasikan apa sebab kondisi sepatu dan sandal seperti itu. Tentu hal ini sangat merugikan konsumen. Alhasil, permasalahan seperti ini bertentangan dengan etika bisnis Islam dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Maka dari itu, melihat permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Penjualan Barang Cacat Dengan Sistem Obral Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Toko Pretty Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Etika Bisnis Islam?
3. Bagaimana penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
3. Untuk menganalisis penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber keilmuan atau pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai hukum penjualan barang cacat dengan sistem obral, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan usaha, agar sesuai dengan peraturan yang benar baik peraturan agama maupun peraturan pemerintah.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan baru. Sehingga dapat diperoleh suatu informasi baru tentang penjualan barang cacat dengan sistem obral, yang kemudian dapat meminimalisir pelanggaran, dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Penjualan Barang Cacat dengan Sistem Obral ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan penjelasan lebih lanjut dengan menyajikan penegasan istilah-istilah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerancuan pemahaman dan perbedaan penafsiran atau cara pandang terhadap judul pada skripsi ini, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Penjualan Barang Cacat

Penjualan adalah proses, cara, perbuatan menjual suatu barang.⁸ Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).⁹ Cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak).¹⁰ Jadi, penjualan barang cacat adalah proses atau cara menjual benda berwujud yang memiliki kekurangan sehingga menyebabkan nilai atau mutunya kurang sempurna.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... hlm 478.

⁹ <https://kbbi.web.id/barang>, diakses pada hari Rabu, 03 Juli 2019, pukul 18.49

¹⁰ <https://kbbi.web.id/cacat>, diakses pada hari Rabu, 03 Juli 2019, pukul 18.51

b. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹¹

c. Obral

Obral adalah menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah (dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang, dan sebagainya).¹²

d. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penjualan Barang Cacat dengan Sistem Obral ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” adalah penelitian terkait keadaan dan sistem penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty, apakah telah sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau sebaliknya. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan penjualan barang cacat dengan sistem obral di Toko Pretty telah sesuai

¹¹ <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada hari Rabu, 03 Juli 2019, pukul 18.55

¹² <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada hari Rabu, 03 Juli 2019, pukul 18.57

dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi lima bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terkait dengan gambaran umum mengidentifikasi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian kualitatif berdasarkan dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terkait dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan atau hasil wawancara

dengan narasumber, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data dan temuan penelitian

Bab V Pembahasan, dalam bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI Penutup, dalam bab ini memuat saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah.